



Kota Akan Dapat Dana Kelurahan Rp 15,8 M

YOGYA (KR) - Dana kelurahan dari pemerintah pusat senilai Rp 15.882.345.000 akan mengalir ke-45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Diperkirakan, dana itu bisa mulai dicairkan pada Maret 2019.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, dana tersebut wajib digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dana kelurahan merupakan buah perjuangan dari kita dan Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia. Kita bersyukur setelah ada dana desa di DIY, kelurahan se-Kota Yogya masing-masing akan mendapatkan dana Rp 352 juta dan satu lagi Kelurahan Wates di Kulonprogo. Dana kelurahan ini bisa menjadi tambahan fiskal dan kekuatan. Terima kasih pak Jokowi dan DPR RI yang telah menyetujui dana kelurahan tahun 2019," ungkapnya saat melakukan *monitoring* persiapan penggunaan dana kelurahan di Kantor Kelurahan Suryatmajan, Selasa (8/1).

Ia meyakinkan, ke depan harus dipastikan dana kelurahan itu mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana serta prasarana. "Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR kemiskinan masih di angka 12,03 persen," katanya.

Menurut Eko, kehadiran dana kelurahan

membawa harapan besar untuk menyelesaikan problem di Kota Yogyakarta yang sebagian besar terkait kemiskinan dan pengangguran. "Caranya adalah, bagaimana duit itu muter di kelurahan. Aja metu. Kita harapkan dana kelurahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ada program dan kegiatan, belanjanya harus di wilayah kelurahan. Kami minta Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijakan untuk memprioritaskan potensi lokal. Pembangunan sarana dan prasarana gunakan tenaga kerja dari kelurahan setempat. Demikian juga saat belanja barang, sehingga menambah pertumbuhan ekonomi. Duitnya harus mengalir lagi ke masyarakat. Itu kuncinya," paparnya.

Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY, Maladi menambahkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai teknis penggunaan dana kelurahan, jajarannya bersama Komisi A DPRD DIY akan konsultasi ke Kemendagri.

"Setelah konsultasi kami akan tindak lanjut dengan kebijakan Pak Gubernur. Angkanya sudah fix. Tahun ini yang dapat semua kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kelurahan Wates Kulonprogo. Untuk awal ini, mari dana yang sudah tersedia di APBN ini dikelola dengan baik," kata Maladi. (M-1)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005